

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:13) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu).

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance*, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi pada Dinas di Kota Tasikmalaya.

3.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian

3.2.1 Letak Geografis

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" Bujur Timur- 108°24'02" Bujur Timur dan antara 7°10' Lintang Selatan -7°26'32" Lintang Selatan. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung ±105 km dari ibu kota negara, yaitu Jakarta ±255 km. Secara administratif Kota Tasikmalaya berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu:

Tabel 3.1
Batas Wilayah

Sebelah Utara	Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisyong dan Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaurbeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy.
Sebelah Selatan	Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras, dan Sukaraja)
Sebelah Barat	Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, dan Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan.
Sebelah Timur	Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya, dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

Sumber: <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> (2021)

3.2.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

1. Visi

Kota Tasikmalaya yang religius, maju, dan mandani.

2. Misi

- a. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
- b. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- c. Memantapkan infrastuktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- d. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.3 Logo dan Arti Pemerintah Kota Tasikmalaya



Gambar 3.1
Logo Pemerintah Kota Tasikmalaya
 Sumber : <https://portaltasikmalayakota.go.id>

Arti logo Pemerintah Kota Tasikmalaya, yaitu :

1. Lambang Kota Tasikmalaya berbentuk tameng/perisai, dengan warna dasar biru muda yang didalamnya terdapat gambar, warna, dan bentuk serta dibagian atas terdapat gambar, warna dan bentuk serta dibagian bawah terdapat tulisan “KOTA TASIKMALAYA” dan dibagian bawah terdapat tulisan “KOTA RESIK” dengan warna huruf hitam di atas pita warna putih.
2. Lambang Kota Tasikmalaya terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bagian depan terdiri dari:
 - 1) Bagian depan terdiri dari:
 - a) Gambar Payung Geulis artinya pelindung, merupakan simbol perlindungan hukum dari Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset kehidupannya. Pegangan payung ber-

jumlah 5 melambangkan pancasila sebagai falsafah negara. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

- b) Tulisan/motto “KOTA RESIK” dimana konsepnya diambil dari :
- Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang hidup bergotong-royong dan masyarakatnya yang rajin dan kreatif sehingga menjadi kota yang ramah, rukun, repeh, rapih, dan ran-cage;
 - Kota Tasikmalaya dengan penataan kotanya yang representatif sehingga menjadi kota yang indah;
 - Kota Tasikmalaya dengan sumber daya manusianya yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menjadi kota yang sehat, jasmani, rohani, social, dan spiritual;
 - Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang religius sehingga menjadi kota yang masyarakatnya iman dan taqwa;
 - Kota Tasikmalaya dengan tanahnya yang subur kotanya yang aman serta kondisi perekonomiannya yang baik sehingga menjadi kota yang kerta raharja.
- c) Tulisan “KOTA TASIKMALAYA” menunjukkan sebutan bagi Kota dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- d) Pita mengandung makna sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai luhur/filosofi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.

b. Bagian tengah terdiri dari:

1) Gambar Kubah Mesjid sebagai simbol kota santri, penerapan simbol ini sebagai perwujudan dari image atau citra yang sudah melekat di masyarakat, bahwa Kota Tasikmalaya sebagai kota santri. Disamping itu sejak dahulu Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang paling banyak pesantrennya.

2) Gambar Gunung artinya kokoh/kuat.

Merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Tasikmalaya dari segala guncangan dan gangguan. Gunung digambarkan lebih dari satu untuk mengingatkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai kota sepuluh ribu bukit.

3) Gambar Bangunan/Pabrik artinya pembangunan.

Merupakan simbol keberhasilan Pemerintah Kota Tasikmalaya dari semua aspek kehidupan khususnya di bidang pembangunan. Terbentuknya Kota Tasikmalaya juga merupakan salah satu hasil dari berkembangnya pembangunan. Penerapan simbol ini juga bermakna sebagai kota yang berkembang menuju kota industri. Jendela berjumlah 17 bermakna sebagai hari diresmikannya Kota Tasikmalaya yaitu tanggal 17 Oktober 2001.

4) Gambar Bordir Bunga artinya harum.

Merupakan simbol kemashuran Kota Tasikmalaya, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, Kota

Tasikmalaya menjadi harum atau dikenal. Simbol gambanya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

5) Gambar Anyaman Bambu artinya gotong royong.

Merupakan dasar kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya. Penerapan simbol ini sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kebersamaan. Disamping itu juga sejak dahulu masyarakat tasikmalaya dikenal dengan kehidupan bergotong-royong. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

c. Bagian dasar terdiri dari:

Bentuk dasar diambil dari bentuk tameng/perisai yang sudah distilasi (penyederhanaan bentuk). Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh dan sudah dibuktikan keampuhannya. Begitu juga pada logo ini tameng dimaksudkan sebagai wadah untuk melestarikan atau melindungi simbol-simbol kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.

3.2.4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan mengelola sumber daya alam yang ada disuatu daerah diperlukan pembagian tugas yang efektif dan efisien sehingga visi dan misi daerah dapat tercapai, pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah. Dalam PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur Bupati/ Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Sedangkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

4. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

5. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan.

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

9. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

11. Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

12. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

13. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

14. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

17. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

19. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistic serta persandian.

20. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah.

22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan sebagai urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan di bidang bencana dan kebakaran.

25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

26. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan sebagai urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

27. Kecamatan Cihideung

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

28. Kecamatan Cipedes

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

29. Kecamatan Tawang

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

30. Kecamatan Indihiang

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

31. Kecamatan Kawalu

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

32. Kecamatan Cibeureum

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

33. Kecamatan Tamansari

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

34. Kecamatan Mangkubumi

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

35. Kecamatan Bungursari

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

36. Kecamatan Purbaratu

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan diwilayahnya.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmiahan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Sugiyono, 2015: 3).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan sensus. Menurut Sugiyono (2015:207) pengertian pendekatan deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi *good government governance* dan kompetensi

staf akuntansi terhadap kualitas informasi akuntansi pada organisasi perangkat daerah di kota tasikmalaya.

3.3.1 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, definisi operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif. Menurut Sugiyono (2015:96) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah *good government governance* dan kompetensi staf akuntansi.

3.3.1.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti. Menurut Sugiyono (2015:97) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kualitas informasi akuntansi.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
<i>Good Government Governmace</i> (X1)	<i>Good Governance</i> adalah “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations’s affair at all levels (UNDP dalam Mardiasmo, 2018:22)	1. Partisipasi 2. Tegaknya premasi Hukum 3. Taat Hukum 4. Transparansi 5. Daya Tanggap 6. Berorientasi pada Konsesus 7. Kesenjangan 8. Akuntabilitas 9. Visi Strategis	Interval
Variabel Kompetensi Staf Akuntansi	Definisi Variabel Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (<i>knowledge</i>), keahlian (<i>skill</i>), dan sikap (<i>attitude</i>) (Edison, Anwar, dan Komariyah, 2016:142)	Indikator 1. Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) 2. Kemampuan (<i>Skill</i>) 3. Sikap (<i>Attitude</i>)	Skala Interval
Kualitas Informasi Akuntansi	Kualitas informasi akuntansi keuangan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan, dan suatu laporan yang dikoordnasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, 2014:57)	1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Relevan 4. Lengkap	Interval

Sumber: Mardiasmo (2018), Edison, Anwar dan Komariyah (2016), dan Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2014).

3.3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis data :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:223) data primer adalah sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian data primer dikumpulkan menggunakan metode kuisioner.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:223) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada dan jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian.

3.3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data berupa :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

a. Kuesioner

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yaitu pada kepala dinas dan bagian akuntansi di Dinas Daerah di Kota Tasikmalaya.

Menurut Sugiyono (2013:199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada responden untuk dijawab, dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

Jenis kuesioner yang digunakan oleh penulis adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya yang dimaksudkan agar responden lebih mudah dalam memberikan jawaban dan juga dapat mempermudah penulis pada saat melakukan analisis data setelah kuesioner terkumpul.

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang fenomena sosial. Alternatif jawaban dengan menggunakan skala *likert*, yaitu dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Alternatif Jawaban dengan Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2017:94)

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan ke dalam tabel, dan dianalisis. Berdasarkan jumlah skor jawaban

responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan.

Penetapan peringkat dalam setiap variabel dapat dilihat dari perbandingan antara skor *aktual* dan skor ideal. Perolehan kecenderungan jawaban responden dapat didasarkan pada nilai rata-rata skor jawaban dikategorikan pada rentang skor :

$$\text{Skor minimum} = 1$$

$$\text{Skor maksimum} = 5$$

$$\text{Lebar skala} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Untuk kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kriteria Interpretasi Skor

Skala	Kriteria
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 – 2,60	Tidak Baik
2,61 – 3,40	Kurang Baik
3,41 – 4,20	Baik
4,21 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Sugiyono (2017)

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian.

3. Riset Internet (*Online Research*)

Pengumpulan data berasal dari situs resmi yang berhubungan dengan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian.

3.3.2.3 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117).

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek populasi adalah 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Tasikmalaya disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
4	Inspektorat Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Dinas Pendidikan
12	Dinas Kesehatan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Sosial
19	Dinas Tenaga Kerja
20	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
21	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Dinas Lingkungan Hidup
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
26	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	Kecamatan Cihideung
28	Kecamatan Mangkubumi
29	Kecamatan Cibeureum

30	Kecamatan Tamansari
31	Kecamatan Cipedes
32	Kecamatan Kawalu
33	Kecamatan Indihiang
34	Kecamatan Tawang
35	Kecamatan Bungursari
36	Kecamatan Purbaratu

Sumber : <https://data.tasikmalayakota.go.id> (2021)

Dalam penelitian ini penulis mengambil responden dari perangkat OPD yang menjalankan pemerintahan. Pemilihan perangkat OPD sebagai responden karena perangkat OPD merupakan bagian aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga diharapkan informasi yang diinginkan oleh penulis dapat tepat sasaran. Untuk responden setiap OPD adalah sebanyak 2 orang yang merupakan staf bagian keuangan, sehingga jumlah responden secara keseluruhan adalah sebanyak 72 orang responden.

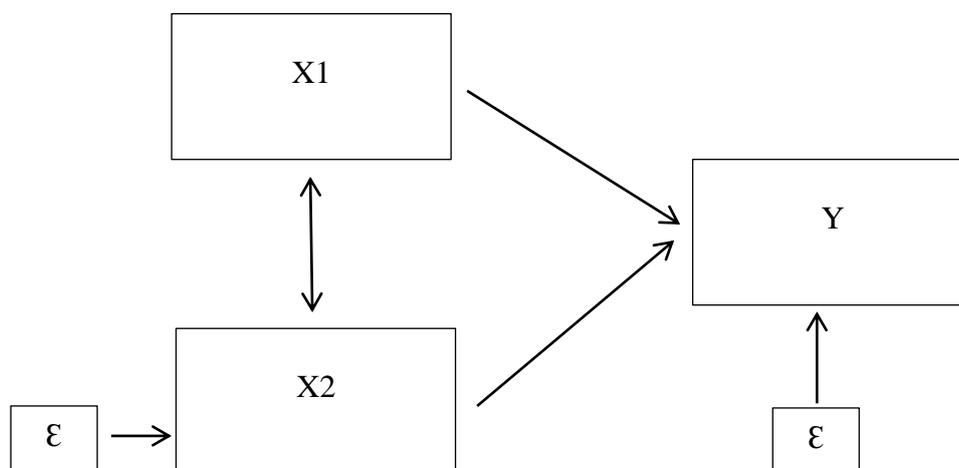
3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat teknik sampling. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016 : 82). Dalam probabilitas sampling ini terdapat beberapa teknik, yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling* yang dimana teknik tersebut termasuk kedalam jenis teknik *non probability sampling*. Dalam buku Metode Penelitian oleh (Sugiyono 2016 : 85) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki

kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari pertama variabel independen (variabel bebas), yang menjadi variabel independennya adalah *Good Government Governance* (X_1) dan Kompetensi Staf Akuntansi (X_2). Yang menjadi variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini adalah Kualitas Informasi Akuntansi (Y).



Gambar 3.2
Paradigma Penelitian

Keterangan :

X_1 = *Good Government Governance*

X_2 = Kompetensi Staf Akuntansi

Y = Kualitas Informasi Akuntansi

ε = Variabel yang tidak diteliti
 \longrightarrow = Pengaruh

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:206). Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah path analysis untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel independen X: Implementasi *Good Government Governance*, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap variabel dependen Y: Kualitas Informasi Akuntansi. Selain teknik ini, dilakukan juga uji validitas untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu hasil dan uji realibilitas untuk mengetahui sejauh mana tingkat konsistensi dari pengukuran suatu tes.

Tujuan digunakannya analisis jalur yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh seperangkat variabel X dan pengaruh antar variabel X. Pada analisis jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. Selain itu juga, tujuan dipakainya analisa jalur ini untuk menerangkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lainnya sebagai variabel terikat.

3.7 Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016:125) menjelaskan bahwa uji validitas adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (yang telah diukur) itu valid. Jika valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Atas dasar pendapat dari Sugiyono tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk dapat melanjutkan kegiatan penelitian serta mendapatkan hasil akhir yang valid dan reliable. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data dalam pengujian validitas dilakukan dengan menghubungkan korelasi antara skor tiap butir instrumen dengan skor totalnya.

Untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05. Berdasarkan definisi di atas, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (Kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang digunakan peneliti untuk diukur. Adapun rumus *Person Product Moment* yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[(n\sum x^2) - (\sum x)^2][(n\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi (Validitas)

x = Jumlah skor item

y = Jumlah skor total

xy = Skor pada subyek item n dikalikan dengan skor total

n = Jumlah responden

Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Sebaliknya jika bernilai negatif, atau positif namun lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Pengujian ini dilakukan dengan program *SPSS versi 25* dan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

1. Jika r hitung $\geq r$ tabel, maka instrument atau soal yang dalam pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
2. Jika r hitung $\leq r$ tabel, maka instrument atau soal yang dalam pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menilai kesetabilan dan ukuran konsistensi responden dalam menjawab butir pertanyaan dalam kuesioner.

Menurut Sugiyono (2017:130) menyatakan bahwa uji reabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Teknik perhitungan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *internal consistency reliability* dengan menggunakan koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* dengan bantuan program *SPSS v 25*. *Cronbach's Alpha* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma^2_b}{\sigma^2_t} \right]$$

Keterangan:

α = Koefisien reabilitas alpha

k = Banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma^2_b$ = Jumlah variasi butir

σ^2_t = Variasi total

Koefisien reabilitas skala haruslah di usahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati angka satu (1). Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis *Cronbach's Alpha* yaitu jika nilai koefisien $\geq 0,70$ maka instrument tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 2015:184).

3.7.3 Uji *Path Analysis*

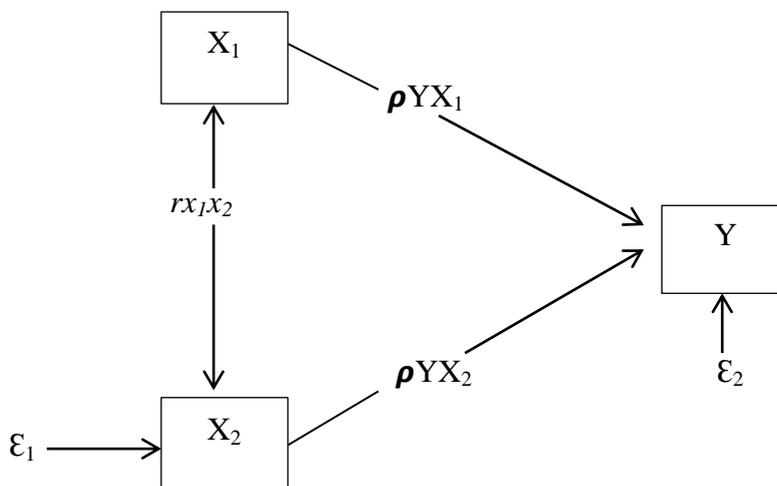
Ghozali (2013:249), menyatakan bahwa “Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori”. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen maka dilakukan dengan penggunaan metode analisis jalur (*Path Analysis*). *Path Analysis* adalah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan

menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Jonathan Sarwono, 2012:17).

Alasan dipilihnya teknik path analisis ini adalah karena bisa melihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama-sama. Penggunaan *path analysis* ini juga bisa digunakan untuk menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari beberapa variabel penyebab terhadap variabel lain yang terikat. Selain hal diatas, path analisis juga bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh dari seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen.

Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam *path analysis* yaitu:

1. Membuat diagram jalur



Gambar 3.3
Diagram Jalur *Path Analysis*

Keterangan:

X_1 = Implementasi *Good Government Governance*

X_2	= Kompetensi Staf Akuntansi
Y	= Kualitas Informasi Akuntansi
$r_{X_1X_2}$	= Koefisien antara X_1 dan X_2
ρ_{YX_1}	= Koefisien jalur variabel X_1 terhadap Y
ρ_{YX_2}	= Koefisien jalur variabel X_2 terhadap Y
$\rho_{YX_1X_2}$	= Koefisien jalur variabel X_1 dan X_2 terhadap Y
ε	= Faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel Y

2. Menghitung koefisien korelasi (r)

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel X_1 dan X_2 . Menghitung koefisien korelasi menggunakan rumus:

$$r_{X_1X_2} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_{ih}X_{jh} - \sum_{h=1}^n X_{ih} \sum_{h=1}^n X_{jh}}{\sqrt{\left(n \sum_{h=1}^n X_{ih}^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_{ih}\right)^2\right) \left(n \sum_{h=1}^n X_{jh}^2 - \left(\sum_{h=1}^n X_{jh}\right)^2\right)}}$$

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat. Demikian jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pedoman Untuk Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2018:274)

3. Menghitung koefisien jalur

Setelah menghitung koefisien korelasi maka selanjutnya adalah perhitungan koefisien jalur. Koefisien jalur mengindikasikan besarnya pengaruh langsung dari suatu variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi.

Koefisien jalur dihitung menggunakan rumus:

$$\rho_{YX_i} = b_{YX_i} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n x_{ih}^2}{\sum_{h=1}^n Y_h^2}}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, k$$

Dimana b_{YX_i} dapat ditentukan melalui:

$$b_{YX_i} = \sum_{h=1}^n C_{ij} \sum_{h=1}^n X_{jh} Y_h; \quad i = 1, 2, \dots, k$$

Keterangan:

ρ_{YX_i} = Koefisien jalur dari variabel X_1 terhadap variabel Y

b_{YX_i} = Koefisien jalur dari variabel X_2 terhadap variabel Y

4. Menghitung koefisien determinasi

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Nilai koefisiensi determinasi

r = Nilai koefisiensi korelasi

5. Menghitung pengaruh faktor residual/nilai sisa

$$\rho_{Y\epsilon_i} = \sqrt{1 - R^2_{y_i x_1 x_2, \dots, x_k}}$$

Dimana:

$$R^2_{y_i x_1 x_2, \dots, x_k} = \sum_{i=1}^k \rho_{yx_1} r_{yx_i}$$

Keterangan:

$\rho_{Y\epsilon_i}$ = koefisien jalur dari variabel lain yang tidak diteliti atau nilai sisa

terhadap variabel Y

R^2_{yx} = Koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variabel penyebab variabel akibat.

6. Pengujian Hipotesis Operasional

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara masing-masing terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t statistic (nilai t yang dihasilkan dari proses regresi) dan nilai t yang diperoleh dari tabel.

Taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau 0,05 karena menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikan 5% artinya kemungkinan besar 95% dari hasil penarikan kesimpulan menunjukkan kebenarannya atau memiliki toleransi secara parsial sebagai berikut:

1) Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

a) Untuk variabel implementasi *good government governance*

$H_0 : \rho_{yX_1} = 0$, artinya Implementasi *Good Government Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

$H_a : \rho_{yX_1} > 0$, artinya Implementasi *Good Government Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

b) Untuk variabel kompetensi staf akuntansi

$H_0 : \rho_{yX_2} = 0$, artinya Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

$H_a : \rho_{yX_2} > 0$, artinya Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi

2) Menentukan pernyataan hipotesis

- H_0 : artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)
- H_a : artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

Maka,

- H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

3) Dasar pengambilan keputusan

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan t hitung dan t tabel yaitu:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

- a) Jika nilai sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Jika nilai sig $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

4) Statistik uji yang digunakan

Rumus umum uji t hitung untuk menguji hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sumber: Sugiyono, 2017:184)

Keterangan:

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = ukuran sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

Sedangkan untuk menentukan nilai t tabel, digunakan kriteria:

a) Taraf signifikan (α) sebesar 0,05

b) Derajat bebas (db) = n – k – 1

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama atau semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dalam penelitian digunakan untuk menguji signifikan pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis secara simultan dirumuskan sebagai berikut:

1) Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$, artinya Implementasi *Good Government*

Governance dan Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

$H_a : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \neq 0$, artinya Implementasi *Good Government*

Governance dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.

2) Dasar pengambilan keputusan

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan F hitung dan F tabel:

a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

a) Jika nilai sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

b) Jika nilai sig $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3) Statistik uji yang digunakan

Rumus uji F hitung untuk menguji hipotesis di atas adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{\frac{1-R^2}{(n-k-1)}}$$

(sumber: Sugiyono, 2017:192)

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah anggota sampel

Sedangkan untuk menentukan nilai F tabel digunakan kriteria:

a) Taraf signifikan (α) sebesar 0,05

b) Derajat bebas (db) = n – k

7. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, maka penulis akan menganalisis kemudian menarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak.

Untuk mengetahui total pengaruh variabel X_1 dan X_2 terhadap Y, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui formula yang disajikan dalam Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

**Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antar
Variabel Penelitian**

No	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
1	$Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y = (\rho_{YX_1})^2$		A
		$(\rho_{YX_1})(r_{X_1X_2})(\rho_{YX_2})$	B
	Total pengaruh X_1	A+B	C
2	$Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y = (\rho_{YX_2})^2$		D
	Total pengaruh X_2		D
	Total pengaruh X_1 dan X_2	C+D	E
	Pengaruh residu	100%-E	F